Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Pemberian *Labeling* Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang

Vitaloka Kusuma Astuti¹, Oci Senjaya²

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, 1910631010282@student.unsika.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

Legal norms that already exist in Indonesia must be obeyed by all Indonesian people, especially law enforcement officers, which has become part of their obligations. However, deviant behavior is often found among law enforcement officers themselves, especially unscrupulous individuals. Not a few cases of irregularities committed by law enforcement officials. On social media, many netizens label law enforcement officers, this is because there are many irregularities committed by law enforcement officers. This causes public confidence in Law Enforcement Officials. The purpose of this study is to identify the factors causing the labeling of law enforcement officers who deviate and make a positive contribution to legal elements so that law enforcement is more effective. To achieve this goal, the research was conducted using a qualitative analysis method, namely a research method that requires descriptive analysis of data, namely something that was said by the informant listed through the internet. The community factor that gives labels to law enforcement officers who deviate is because of the law itself and the factor of the law enforcement officers themselves. Labeling contained in Sociological Theory, tends to be given to people with behavioral disorders who do not meet social standards with societal norms. Various efforts must be made to improve the performance of law enforcement officers, starting from the process of implementing the recruitment of law enforcement officers to sanctions that must be enforced more than violations.

Keywords Community; Social Media; Norms

Cite This Paper Astuti, V. K., & Senjaya, O. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Pemberian Labeling Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang. *Legal Spirit*, 6(2).

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*Rechtsstaats*). Dalam kehidupan bernegara hukum tentunya kita sebagai masyarakat selalu berdampingan dengan Aparat Penegak Hukum. Tanggung jawab utama aparat penegak hukum adalah melindungi nyawa dan harta benda. Semua tugas mereka berhubungan kembali dengan tanggung jawab yang satu ini. Ada berbagai macam jenis aparat penegak hukum dan organisasi. Tugas dilakukan berdasarkan jenis pejabat dan organisasi. Dalam hampir semua situasi, aparat penegak hukum diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka baik saat bertugas maupun tidak. Tugas aparat penegak hukum tergantung pada jenis petugas dan organisasi tempat mereka bekerja.¹ Disamping itu, Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat koheren dan mempunyai level kompetensi yang tinggi, pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks.² Pembahasan

¹ <https://www.seminolestate.edu/criminal-justice/certificate-programs/leo/le-officer>

² Sanyoto, 'Penegakan Hukum Di Indonesia' (2008) *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.8 No. 3 September 2008,2

penegakan hukum erat kaitannya dengan perilaku menyimpang, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa, pejabat publik maupun aparat penegak hukum itu sendiri terutama oknum. Oleh karena itu, pemahaman yang ekstensif tentang perilaku menyimpang sangat berguna dalam upaya penegakan hukum, terutama upaya pencegahan. Dalam kehidupan masyarakat, moralitas telah menjadi pedoman hidup bermasyarakat, serta didirikan juga lembaga-lembaga sosial yang mengedepankan moralitas. Dalam hal ini, terdapat individu masyarakat yang berupaya untuk menegakkan norma yang sudah ada, dan terdapat pula individu yang berupaya untuk mendobrak norma tersebut.³

Menurut Soejono Soekanto, beberapa faktor yang mendorong penegakan hukum salah satunya ialah faktor penegak hukum, artinya para pihak yang terlibat langsung pada proses penegakan hukum yakni antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara dan lembaga pemasyarakatan⁴, memegang peranan krusial dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia tidak hanya produk hukum yang tidak menanggapi, tetapi juga ditemukannya kasus Oknum dari Aparat Penegak Hukum itu sendiri. Bahwasanya pilar terpenting dalam meletakkan dasar penegakan hukum adalah Aparat Penegak Hukum yang dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan pengorbanan yang baik.

Dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat, Menurut Penjelasan sosiologi yang dikemukakan oleh Soelaeman dan Soemardjan, terdapat ilmu sosial yang mengkaji ilmu masyarakat atau dikenal sosiologi, yaitu ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk pula pada perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial merupakan keseluruhan esensi dari unsur-unsur sosial yang paling penting, yakni aturan-aturan sosial (social rules), pranata sosial, kelompok dan kelas sosial. Sedangkan proses sosial adalah interaksi timbal balik antara berbagai aspek kehidupan bersama, Salah satu proses sosial yang berbeda adalah pada bagian peristiwa. Jika digabungkan hak dan sosiologi, maka dapat terlihat hubungan di antara keduanya. Hukum sosiologis yang dibahas ialah hukum yang berurusan dengan kodrat manusia dan masyarakatnya serta menentukan bagaimana etika hukum itu sendiri ada dan bagaimana ia tumbuh dalam kehidupan sosial masyarakat. Lebih khusus, hukum sosiologis alam dijelaskan oleh karakter-karakter; bahwa konsep hukum sebagai alat pengendali masyarakat, hukum terhadap realitas yang ada (realitas sosial) dan signifikannya implementasi sosiologi terhadap hukum itu sendiri.⁵

Di sepanjang tahun 2022 ini telah banyak ditemui beberapa kasus penyimpangan oleh penegak hukum itu sendiri. Bahkan, masyarakat pun turut ikut memberikan kritikan bahkan sarkasme terhadap oknum penegak hukum tersebut. Pasalnya, perlakuan-perlakuan oknum penegak hukum ini jauh dari apa yang seharusnya penegak hukum lakukan. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan ini bukan hanya berimbas pada citra penegak hukum itu sendiri namun berdampak pula pada masyarakat. Tidak sedikit jumlah kasus perbuatan menyimpang serta pelanggaran hukum yang menjerat para Aparat Penegak Hukum terutama Oknum. Mulai dari Oknum kejaksaan, Oknum kepolisian, sampai Oknum Hakim. Hal ini membuat hilangnya kepercayaan publik, banyak orang memberikan stigma negatif kepada Aparat Penegak Hukum bahkan tidak sedikit pula yang memberikan *labeling*.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang memerlukan data deskriptif analitis, yakni sesuatu yang dikatakan informan yang tertera melalui internet. selanjutnya perilaku yang nyata ditelaah dan dipahami sebagai

³Suyato, Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132093042/penelitianPERILAKU+MENYIMPANG+DALAM+PERSPEKTIF+SOSIOLOGIS+suyato.pdf>

⁴Tim FH UNJA. 2020. Eksistensi Mafia Peradilan di Indonesia. Diambil April 17, 2022. Dari <https://law.unja.ac.id/eksistensi-mafia-peradilan-di-indonesia/>

⁵ Soemardjan, Selo dan Soelaeman, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (1974), h. 29 Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI,

suatu bagian yang lengkap. Data yang diambil melalui penelitian observasi dan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang merupakan landasan teori dari sumber bacaan, karya ilmiah dan referensi yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas, lalu setelahnya akan disatukan, dan dianalisa secara runtut, untuk dipertunjukkan dalam bentuk penjabaran untuk mengetahui kepastian terhadap masalah yang ditelaah. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu mempercepat proses analisis, yaitu antara lain: a) hasil penelitian yang spesifiknya berhubungan dengan materi penelitian. b) jurnal ilmiah yang spesifiknya berhubungan dengan materi penelitian. c) Internet.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi Hukum mencoba mengkaji norma dan simbol hukum, yaitu makna hukum yang dapat diterapkan menurut pengalaman dalam suatu kelompok dan periode waktu, serta berupaya mengkonstruksi simbol-simbol tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, termasuk penting untuk mengetahui apa yang mereka simbolkan, dengan mencoba untuk mengamati semua yang mereka buktikan dan menganalisis semua yang mereka sembunyikan. Disamping itu, standar yang digunakan untuk mengabstraksi makna normatif dari simbol yaitu sepenuhnya independen dari fakta hukum, seperti prinsip-prinsip yang mendukung penciptaan sistem makna khusus yang ditetapkan oleh ilmu hukum, hanya dapat dilaksanakan dengan dorongan sosiologi hukum.

Sosiologi hukum memiliki tujuan untuk menerangkan akibat praktik hukum terjadi dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, apa penyebabnya, apa faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya, dan lainnya. Satjipto Raharjo menarik pendapat Max Weber yang menyebut pendekatan semacam itu sebagai pendekatan interpretatif *understanding*, yakni suatu usaha untuk menjelaskan sebab-sebab, pengaruh dan akibat-akibat dari perilaku sosial. Oleh karena itu, mempelajari sosiologi hukum berarti menelaah perilaku orang-orang di bidang hukum sehingga dapat membuktikannya.⁷

Howard Bercker pertama kali memperkenalkan teori labeling pada tahun 1963 dengan karyanya "*Outsiders*". Teori Labeling dalam sosiologi didasarkan pada konsep interaksionisme simbolik, di mana interaksionisme simbolik menyiratkan berbagai jenis simbol digunakan dalam aktivitas sosial dalam interaksi sosial timbal balik. Dalam hal ini, teori labeling juga tentang perorangan yang menggunakan bahasa dan simbol sebagai dasar makna. Bahasa dan simbol-simbol memberi suatu nama pada seseorang untuk kegiatan yang diduga menyimpang. Labeling merupakan salah satu teori sosiologi yang timbul sebagai akibat dari reaksi masyarakat mengenai suatu perbuatan yang diduga menyimpang. Individu yang diduga dan diduga menyimpang maka akan dilabeli atau dilabeli ke lingkungan sosialnya.⁸ Labeling theory atau teori penjulukan bisa dikatakan pula teori reaksi sosial. Namun hanya diterapkan dalam dunia orang-orang yang menyimpang (*devians*).⁹ Pemberian labeling atau penjulukan dibuat oleh orang lain untuk tindakan orang dituju yang menyimpang. Dengan demikian, teori labeling berpusat pada aspek psikologi sosial, suatu kondisi yang menciptakan labeling untuk individu dan kelompok. Teori labeling menggunakan pendekatan interaksionis, yang dimaksud bahwa labeling diucapkan kepada individu atau grup sebagai hasil antarmubungan individu atau grup lain atau antara orang yang menyimpang dengan masyarakat.¹⁰

⁶<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?se>= Diambil April 17,2022

⁷Ma'u,Dahlia Haliah. Paradigma Hukum Sosiologis(Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik, ,9

⁸ Ahmadi, Dadi dan H, Aliyah Nur'ani.(2005).Teori Penjulukan.Vol.6,No.2,2

⁹ Op. Cit, 4

¹⁰Jamilah, Asiyah, Putra, Aista Wisnu.(2020).Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja. Vol 14, No 1,4

Menurut Paul B Horton, Perilaku menyimpang sosial ialah setiap perilaku yang dibidang sebagai pelanggaran pada norma-norma masyarakat atau kelompok.¹¹ Teori labeling memiliki dua elemen utama, konsep penyimpangan serta konsekuensi dari praktik kontrol sosial. Kedua faktor ini menjelaskan asal mula penyimpangan dan bentuk penyimpangan yang tidak sinkron. Penyimpangan dari individu atau grup dapat dibagi menjadi dua jenis, penyimpangan primer (dampak tindakan yang dilabel oleh masyarakat) dan penyimpangan sekunder (penyimpangan yang terjadi sesudah mendapatkan labeling dari masyarakat).¹² Proses pembuatan labeling hingga terjadinya penyimpangan berlangsung secara perlahan-lahan mulai dari fase inisiatif, penerimaan, keharusan hingga menjadi tawanan dalam peran yang menyimpang. Proses penyimpangan ini sejalan dengan yang diusulkan oleh Traub dan Little pada tahun 1985. Analisis proses penyimpangan ini berfokus terhadap anggapan orang lain yang memberikan makna atau labeling kepada individu sebagai perilaku yang dianggap negatif berdasarkan penilaian orang lain.¹³

1. Faktor hukum itu sendiri (legal factor itself)

Faktor hukum yang dibahas yakni undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Mengingat bertambah efektifnya suatu peraturan hukum maka akan bertambah efektif pula peluang untuk menegakkannya. Namun jika sebaliknya maka akan bertambah sukar suatu peraturan hukum ditegakkan. Sistem hukum yang ada di Indonesia belakangan ini, dinilai belum menyadarkan dan membuat jera para pelaku penyimpangan. Secara umum, aturan yang selaras ialah aturan hukum yang berlaku secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Landasan sosiologis dianggap sebagai alasan yang menjelaskan bahwa peraturan dirancang sebagai penyempurnaan keinginan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis berhubungan dengan fakta empiris tentang pertumbuhan *problem*, kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁴

2. Faktor Aparat Penegak Hukum (law enforcement factor)

Penegak hukum merupakan bagian dari sistem penegakan hukum. Pasalnya, Dalam penegakan hukum ini, banyak ditemukan oknum Aparat Penegak Hukum yang lalai dan banyak melakukan penyimpangan. Beberapa Aparat Penegak Hukum condong mengabaikan praktik hukum yang semestinya menjadi pedoman bagi setiap Aparat Penegak Hukum lainnya untuk menegakkan hukum. Perbuatan menyimpang pada tanggal 30 september 2020 yang dilakukan seorang oknum anggota brimob polri yang dimana ia membuang anak kucing dengan cara melemparnya ke parit. Perbuatan menyimpang tersebut didokumentasikan oleh rekannya. Selanjutnya, Rekaman tersebut dibagikan oleh akun Instagram milik @christian_joshuapale pada Hari Rabu tanggal 4 November 2020. Berita tersebut pun menyebar ke seluruh media sosial termasuk twitter, Banyak warganet yang geram atas perbuatan menyimpang yang dilakukan oknum polisi tersebut. "sick bgt oknum wakanda" tulis akun twitter@iro****.¹⁵ Labeling 'oknum wakanda' tersebut merupakan sarkasme yang diberikan oleh warganet kepada oknum penegak hukum yang melakukan penyimpangan.

Dalam kasus yang terjadi, Pada 19 Mei 2021, Polsek Tanjungbalai menemukan perahu kayu di Sungai Lunang, Kecamatan Kepayang. puluhan kilogram narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kapal. Ditemui 11 Oknum anggota polisi yang diketahui mengedarkan

¹¹ <https://spada.fip.unm.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=4030&parent=39019>

¹² Hisyam, Ciek Julyati dan Hamid, Abdul Rahman. Sosiologi Perilaku Menyimpang. (2015)105. Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ

¹³ Aletheia Rabbani . Edwin M. Lemert. Labelling Theory. Diambil April,18 2022. Dari <https://www.sosiologi79.com/2017/11/edwin-m-lemert-labelling-theory-teori.html>

¹⁴ Valerie Augustine Budianto. 2022. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Diambil April 19,2022. Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff> .

¹⁵ Devina Halim. 2020. Oknum Brimob Lempar Anak Kucing ke Parit Lantaran Kesal Makanannya Diambil. Diambil Mei 21, 2022. Dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/22322011/oknum-brimob-lempar-anak-kucing-ke-parit-lantaran-kesal-makanannya-diambil?page=all> l

narkoba dengan menjual narkoba berjenis sabu-sabu seberat 19 kilogram hasil tangkapan dari bandar narkoba. Dari total 76 kg sabu yang ditemukan, hanya 57 kilogram yang dilaporkan. Sehingga ada sekitar 19 kg sabu yang dijual kepada bandar sabu. Para oknum anggota polisi yang mengamankan barang bukti narkoba tersebut sepakat untuk menjual sabu itu. Penjualan sabu-sabu pun disetujui oleh Kanit Satres Narkoba Polres Tanjungbalai.¹⁶ Pada kasus penyimpangan yang terjadi itu, banyak dari masyarakat yang kesal dengan perbuatan para oknum anggota kepolisian tersebut. Warganet pun ikut menanggapi kasus tersebut. "Tiap hari 1 oknum. Hebat betul aparat wakanda" tulis akun twitter @ka*****. Hal itu dimaksudkan bahwa oknum polisi yang dilabeli tersebut merupakan oknum dari pihak kepolisian yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditegaskan oleh peraturan. Perbuatan menyimpang dari para oknum anggota kepolisian ini membuat warganet memberikan labeling seperti 'aparat wakanda'.

Paradoks penegakan hukum pidana di institusi-institusi negara seperti di kepolisian, kejaksaan, KPK, dan institusi pemerintah lainnya, menyebabkan kedudukan Indonesia terus-menerus tersudut di mata lembaga internasional dikarenakan bertele-telanya penyelesaian kasus korupsi, kejahatan dunia maya dan sejenisnya. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di hadapan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Namun pada realitanya, Aparat Penegak Hukum tampaknya sering kali terlihat lengah dan abai terhadap hukum tersebut, Kadang-kadang dapat ditemukan terdapat sebagian orang yang belum diperiksa dan kesalahannya belum jelas, tetapi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kejahatan itu.¹⁷

Diketahui Pada tanggal 15 April 2022, terdapat kasus korban begal yang dijadikan sebagai tersangka pembunuhan. Kasus korban begal di Nusa Tenggara Barat yang semula berstatus saksi lalu dijadikan tersangka. Dengan Hasil penyidikan sementara, polisi menetapkan korban sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP subsidi Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 49 ayat 1 KUHP.¹⁸ Namun, Setelah beberapa hari kemudian, Kapolda NTB menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait perkara Murtede alias Amaq Sinta, korban begal yang menjadi tersangka.¹⁹ Dari Kasus tersebut, Masyarakat pun terheran dengan penyidikan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat berpolemik tentang bagaimana prosedur penanganan yang diambil oleh pihak kepolisian tersebut. Di sosial media, baik itu di twitter maupun instagram, netizen membagikan komentarnya dengan tagar percuma lapor polisi pada akun-akun yang membagikan unggahan berita mengenai kasus korban begal yang dijadikan tersangka oleh anggota kepolisian tersebut. "Cuma di negeri +62 korban begal malah dijadikan tersangka. #percumalaporpolisi " tulis akun twitter @yas***** diunggah pada tanggal 17 April 2022. Tagar percuma lapor polisi yang selalu *netizen* atau warganet berikan saat menanggapi sebuah penanganan kasus yang dilakukan anggota kepolisian dapat dikatakan sebuah pelabelan atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap anggota kepolisian yang menjalankan tugasnya secara irasional di mata publik.

¹⁶Andry Novelino. 2021. 11 Polisi di Tanjung Balai Ditahan Sebab Jual Sabu ke Bandar Diambil Mei 18,2022.Dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211002214306-12-702598/11-polisi-di-tanjung-balai-ditahan-sebab-jual-sabu-ke-bandar>.

¹⁷Ediwarman,(2012) Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. JurnalKriminologi Indonesia Vol.8 No.1 Mei 2012 : 038-051.

¹⁸Eko Ari Wibowo. 2022. Korban Begal Jadi Tersangka Disorot Publik, Polda NTB Ambil Alih Kasusnya. Diambil April 20,2022. Dari <https://nasional.tempo.co/read/1582269/soal-korban-begal-jadi-tersangka-disorot-publik-polda-ntb-ambil-alih-kasusnya>.

¹⁹Tim Saibumi. 2022. Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Yang Sempat Jadi Tersangka. Diambil April 20, 2022. Dari <https://www.saibumi.com/artikel-117398-polda-ntb-terbitkan-sp3-kasus-amaq-sinta-korban-begal-yang-sempat-jadi-tersangka.html>.

PENUTUP

Sosiologi hukum yang relevan bukanlah aturan-aturan dengan muatan abstrak dan stereotipik, melainkan apa yang benar-benar diamati dalam kenyataan. Oleh karena itu, hukum menjadi hukum bukan karena ia menciptakan suatu peraturan, tetapi karena kita mengamatinya secara nyata. Dalam pandangan sosiolog fungsionalis, perilaku menyimpang adalah segala sesuatu yang menyimpang dari moral dan nilai-nilai masyarakat. Masyarakat saat ini cenderung apriori terhadap citra Aparatur Penegak Hukum, khususnya oknum, karena apa yang mereka amati jauh dari citra ideal Aparatur Penegak Hukum yang diharapkan, persoalannya di sini bukanlah berapa banyak oknum yang salah, tetapi kekecewaan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat yang pada akhirnya berujung pada *public complaint*. yakni berbagai pengaduan masyarakat tentang perilaku oknum aparat penegak hukum yang telah merusak nama baik aparat penegak hukum.

Labeling yang terdapat dalam Teori Sosiologi, cenderung diberikan kepada penderita gangguan perilaku yang tidak memenuhi standar sosial dengan norma masyarakat. Labeling terhadap oknum aparat penegak hukum diatas dikarenakan sebagian besar dari mereka yang seharusnya mematuhi norma yang berlaku, tetapi malah sebaliknya. Salah satu pemicu rendahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas aparat penegak hukum, terutama oknum yang tidak bermoral. Moral yang rendah mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan skeptisisme dalam kebijakan penegakan hukum. Para *netizen* membagikan komentar dengan labeling 'aparat wakanda' '#percumalaporpolisi' Hal itu dimaksudkan karena oknum aparat yang tidak menjalankan kewajiban sebagai penegak hukum dengan semestinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukannya sangat menyimpang dari aturan.

Peneliti menyadari bahwa tidak semua aparat penegak hukum melakukan penyimpangan, hanya beberapa oknum saja yang melakukan. Peneliti berpendapat bahwa masih banyak penegak hukum di negara kita yang menjamin hukum yang adil. Pentingnya mengembalikan kepercayaan masyarakat yang hilang terhadap aparat penegak hukum. Dari penjelasan di atas, diperlukan perbaikan kinerja penegak hukum. Penegak hukum yang melanggar hukum harus ditegakkan kembali sanksinya. Beberapa upaya harus dilakukan dan dibenahi untuk meningkatkan citra lembaga penegak hukum dan kinerja aparat penegak hukum. Mulai dari proses rekrutmen polisi, jaksa, dan hakim yang harus dilakukan secara transparan, mereka yang terpilih dalam seleksi memang layak menjadi individu yang berkredibilitas dan kompeten dalam menegakkan keadilan. Yang terpenting adalah membangun integritas dan moral penegak hukum. Sangat perlu untuk meningkatkan moral dan etika Aparatur Penegak Hukum di Indonesia, agar tidak ada lagi ditemukan oknum-oknum yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hisyam, Ciek Julyati dan Hamid, Abdul Rahman. Sosiologi Perilaku Menyimpang. (2015)105. Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.

Soemardjan, Selo dan Soelaeman, Setangkai Bunga Sosiologi, (1974), h. 29 Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.

Artikel Jurnal

Ahmadi, Dadi dan H, Aliyah Nur'ani.(2005).Teori Penjulukan.Vol.6,No.2,2.

Jamilah, Asiyah, Putra, Aista Wisnu.(2020).Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja. Vol 14, No 1,4.

Ediwarman,(2012) Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia. JurnalKriminologi Indonesia Vol.8 No.1 Mei 2012 : 038-051.

Suyato, Perilaku Menyimpang Dalam Perspektif Sosiologis. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132093042/penelitianPERILAKU+MENYIMPANG+DALAM+PERSPEKTIF+SOSIOLOGIS+suyato.pdf>

Sanyoto, (2008) Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No. 3 September 2008,2.

Ma'u,Dahlia Haliah. Paradigma Hukum Sosiologis(Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik, ,9.

Website

Aletheia Rabbani . Edwin M. Lemert. Labelling Theory. Diambil April,18 2022. Dari <https://www.sosiologi79.com/2017/11/edwin-m-lemert-labelling-theory-teori.html>

Andry Novelino. 2021. 11 Polisi di Tanjung Balai Ditahan Sebab Jual Sabu ke Bandar Diambil Mei 18,2022.Dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211002214306-12-702598/11-polisi-di-tanjung-balai-ditahan-sebab-jual-sabu-ke-bandar>

Aril Syahril Ramadhan. 2021. Oknum Polisi Diduga Palak Sopir Truk, Netizen: Itu Preman Berseragam. Diambil April 20, 2022.Dari <https://jabar.suara.com/read/2021/08/16/150932/oknum-polisi-diduga-palak-sopir-truk-netizen-itu-preman-berseragam>

Devina Halim. 2020. Oknum Brimob Lempar Anak Kucing ke Parit Lantaran Kesal Makanannya Diambil. Diambi Mei 21, 2022.Dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/22322011/oknum-brimob-lempar-anak-kucing-ke-parit-lantaran-kesal-makanannya-diambil?page=all>

Eko Ari Wibowo. 2022. Korban Begal Jadi Tersangka Disorot Publik, Polda NTB Ambil Alih Kasusnya. Diambil April 20,2022. Dari <https://nasional.tempo.co/read/1582269/soal-korban-begal-jadi-tersangka-disorot-publik-polda-ntb-ambil-alih-kasusnya>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10710/BAB%20III.pdf?se=>
Diambil April 17,2022.

<https://www.seminolestate.edu/criminal-justice/certificate-programs/leo/le-officer>
Diambil Mei 29,2022.

Tim FH UNJA. 2020. Eksistensi Mafia Peradilan di Indonesia. Diambil April 17, 2022. Dari <https://law.unja.ac.id/eksistensi-mafia-peradilan-di-indonesia/>

Tim Saibumi. 2022. Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Yang Sempat Jadi Tersangka. Diambil April 20, 2022. Dari <https://www.saibumi.com/artikel-117398-polda-ntb-terbitkan-sp3-kasus-amaq-sinta-korban-begal-yang-semptajadi-tersangka.html>

Valerie Augustine Budianto. 2022. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Diambil April 19,2022. Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>